



Diprotes, Rencana Pembangunan Pos Pengawas di Muara Tukad Mati



• NUSABALI/YUDA

SEJUMLAH pekerja sedang memasang long storage di muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, Badung, Minggu (25/10). Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Badung akan membangun pos pengawas khusus pemantau sampah di kawasan tersebut, namun rencana itu diprotes oleh sebagian warga.

MANGUPURA, NusaBali

Progres pembangunan long storage di muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, disebut sesuai perencanaan. Meski demikian belakangan muncul riak-riak permasalahan, yakni menyangkut rencana Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) yang akan membangun pos pengawas khusus pemantau sampah. Sejumlah warga disebut-sebut keberatan karena posisi pos pengawas cukup dekat dengan pemukiman warga.

Informasi yang dihimpun, keberatan warga karena terkesan tidak ada sosialisasi sebelumnya atas rencana pembangunan itu. Tiba-tiba salah seorang warga yang bermukim lama di sana melihat pekerja memasang patok tanda merah persis di belakang bangunan salah seorang warga. Setelah ditelusuri ternyata Dinas BMP Badung akan membangun pos pengawas untuk tempat berkantor personel yang sengaja nanti ditempatkan di lokasi tersebut. Bahkan kabarnya tak sekadar pos untuk berkantor, tapi akan jadi lokasi parkir truk-truk pengangkut sampah. Inilah yang menjadi

alasan keberatan warga.

Pihak Dinas BMP Badung tidak memungkiri permasalahan di lapangan. Akan tetapi berkilah bila rencana itu sudah tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Kabid Pengairan Dinas BMP Badung AA Gde Dalem, menyatakan, komunikasi dengan masyarakat atas rencana pembangunan pos pengawas berjalan cukup baik. Walaupun memang ada pihak yang masih keberatan.

"Tapi kami pikir itu wajar-wajar saja. Mungkin yang menolak belum paham, dikiranya akan dibangun tempat penampungan sampah, padahal hanya untuk pos pengawas saja. Modelnya jadi kantor lah, karena nanti kami akan siagakan personel di sana. Maka perlu tempat," beber pria berkacamata itu, Minggu (25/10).

Menyikapi riak-riak yang muncul, pihaknya berjanji segera membangun komunikasi dengan seluruh masyarakat wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, terutama yang rumahnya tak jauh dari muara Tukad Mati. Harapannya warga paham bila maksud pembangunan pos pengawas bukan untuk

tempat sampah, melainkan hanya untuk berkantor personel di lapangan. Masih menurut Gung Dalem, begitu dia disapa, pihaknya akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat demi menyelesaikan masalah ini.

Kalaupun tidak ada titik temu, Gung Dalem menambahkan, pihaknya tak mempermasalahkannya. Sebab sudah ada plan B yang disiapkan, yakni pembangunan pos akan digeser agak menjauh dari pemukiman penduduk. "Ya walaupun agak jauh dan tidak bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, *nggak* apa lah. Nanti akan kami geser menjauh," ucapnya. "Tapi sebetulnya kami sengaja merencanakan pembangunan pos pengawas dekat dengan rumah warga itu agar ada interaksi petugas dengan warga," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas BMP IB Surya Suamba tak banyak berkomentar terkait permasalahan yang terjadi. Dia hanya menyatakan progress proyek pembangunan long storage sudah sekitar 85 persen. "Rencana akhir November pemasangan perkuatan dinding sungai sudah selesai," ucapnya. **as**



Insentif Habis, Vasektomi Terhenti di 30 Akseptor ✓

AMLAPURA, NusaBali

Lantaran dana insentif habis, kegiatan vasektomi terhenti setelah tercapai target 30 akseptor. Padahal masih banyak akseptor yang bersedia ambil bagian di program itu. Gara-gara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) Karangasem kurang antisipasi, sehingga capaiannya tak mampu melebihi target.

Kepala BPP dan KB dr Priagung Duarsa mengakui hal itu. Banyaknya calon akseptor yang bersedia ikut program tersebut, di luar dugaan.

Priagung Duarsa menuturkan hal itu di Amlapura, Minggu (25/10). Dipaparkannya, insentif tersedia untuk 30 akseptor, per akseptor sebagian insentif Rp 2 juta, berarti insentif tersedia Rp 60 juta. "Sedangkan di APBD Perubahan 2015, kami tidak anggaran. Mestinya kami menyediakan anggaran melebihi target, tahun depan kami tambah anggaran," kata Priagung Duarsa didampingi Kabid Data Kanganin Subandi.

Dari 30 akseptor yang ikut vasektomi, katanya, paling banyak pesertanya dari Kecamatan Kubu, 13 akseptor. Begitu juga, tahun 2014, tercatat dari Kecamatan Kubu, 17 akseptor ambil bagian dari target 20 akseptor.

Setelah insentifnya naik, tahun 2014 Rp 1,5 juta, tahun 2015 Rp 2 juta maka pesertanya terus meningkat. Insentif itu berasal dari Pemprov Bali Rp 500.000,- dan APBD Kabupaten Karangasem 2015 Rp 1,5 juta.

Insentif itu sebagai pengganti para akseptor, setelah menjalani program vasektomi, diperkirakan selama dua minggu tidak bisa kerja, menunggu lukanya kering dan bisa kembali melakukan aktivitas.

Selama ini kata Priagung Duarsa kegiatan vasektomi, mem-berdayakan 78 tenaga penyuluh. "Kalau saja, 78 tenaga penyuluh itu kami bebani target 1 peserta akseptor saja, berarti minimal tiap tahun mampu melibatkan 78 akseptor yang divasektomi. Berarti tiap desa pesertanya tiap tahun satu akseptor," tambahnya.

Priagung mengingatkan, para peserta KB pria itu, tidak perlu dikhawatirkan hasilnya. Tetap masih bisa berhubungan, hanya saja, saluran sperma dihambat. Apalagi telah ada teknologinya canggih, jika bosan ikut vasektomi, bisa kembali normal. Sebab, bagian urat saluran sperma hanya dilipat, suatu saat bisa dikembalikan. Vasektomi itu adalah metode kontrasepsi dengan cara melipat urat saluran sperma agar tidak mampu membuahi.



• NUSABALINANTRA
dr Priagung Duarsa, Kepala BPP dan KB tengah melayani akseptor menjalankan program vasektomi.

Tetap saja bagi yang ikut program vasektomi katanya, mesti ada alasannya. Pesertanya mesti sukarela, atau atas persetujuan istri, jumlah anak cukup minimal dua, mengetahui akibat-akibat vasektomi, umur calon akseptor di atas 30 tahun dan sebagainya.

Program vasektomi sebelumnya, tahun 2013 mencapai 26 akseptor, justru capaian tahun 2014 sebanyak 20 akseptor, dan tahun 2015 sebanyak 30 akseptor. **k16**

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015

Hal : 8



PDAM Tak Pasang Meteran

Aliran Air Telaga Waja Tak Terukur

Ada empat lembaga yang mengurus soal sumber air di Telaga Waja dan keempatnya tidak pernah ada titik temu, untuk merealisasikan pelayanan.

AMLAPURA, NusaBali

Pihak PDAM Karangasem mendapatkan sumber air baru setelah mulai sebulan terakhir mendapatkan suplai dari proyek Sungai Telaga Waja. Namun eksploitasi air itu masih tanpa diukur dengan meteran. Padahal belum ada penandatanganan naskah kerjasama, dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Provinsi Bali, tetapi telah memanfaatkan air tersebut sementara PDAM belum bayar.

Namun, sesuai perjanjian lisan, rencananya pihak PDAM membeli Rp 1.200 per meter-



• NUSABALI/NANTRA

PROYEK air Sungai Telaga Waja, mulai dimanfaatkan PDAM, hanya saja mengalirkan air belum diukur meteran.

kubik. Direktur PDAM I Gede T Baktiyasa mengakui hal itu. Walau belum ada penandatanganan kerjasama, air telah mengalir, digunakan melayani Kecamatan Selat, Kecamatan Sidemen dan Kecamatan Rendang. Baktiyasa menjelaskan hal itu di Amlapura, Minggu (25/10).

Penjelasan lisan katanya, telah ada kata sepakat, PDAM membeli Rp 1.200 per meter

kubik, hanya saja belum ada MoU. "Tetapi air telah mengalir sejak sebulan terakhir, sehingga pelayanan di Kecamatan Selat, Kecamatan Rendang dan Kecamatan Sidemen, jadi lancar," katanya.

Padahal yang mengurus proyek air Sungai Telaga Waja, ada empat lembaga, yakni: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, Dinas PU Provinsi Bali, PK PAM (Peningkatan Kinerja

Edisi : Senin, 26 Oktober 2015

Hal : 8



Perusahaan Air Minum) dan UPT (Unit Pelaksana Teknik) Provinsi Bali. Keempat lembaga tersebut tidak pernah ada titik temu, untuk merealisasikan pelayanan.

Semasa pemerintahan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg 2005-2010, dan tahun 2010-2014, beberapa kali dipertemukan, tidak ada solusi. Sehingga air tersebut mestinya mengalir hingga ke Kecamatan Kubu mulai tahun 2012, masih terbengkalai.

"Terpenting nantinya kami membeli Rp 1.200 per meter kubik, selanjutnya kami jual dengan harga dasar Rp 1.500 per meter kubik. Kami hanya menerima aliran air, tidak ada hubungan dengan infrastruktur pipa itu," katanya.

Sehingga PDAM tidak ada hubungannya dengan penyusutan pipa proyek Sungai Telaga Waja, biaya operasional dan tingkat kebocorannya. Begitu air masuk pipa PDAM, mulai dari jaringan itulah jadi tanggungjawab PDAM.

PDAM sendiri memberlakukan tarif untuk pelanggan rumah tangga, 0-10 meterkubik Rp 1.500,- per meterkubik, se-

dangkan 11-20 meterkubik Rp 2.275, dan 21 meterkubik ke atas Rp 4.150.

Setelah PDAM dapat tambahan sambungan dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2015 sebanyak 648 sambungan, juga bantuan 2.000 sambungan dari USAID (United States Agency for International Development) tahun 2014-2015, sehingga pelanggan menjadi 32.095 pelanggan.

Namun bertambahnya pelanggan itu, belum diimbangi dengan perbaikan kantor yang representatif, menambah petugas pelayanan, mengubah struktur kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan. "Soal kantor baru, kan menjadi kebijakan pengawas dan Bupati Karangasem," kilahnya.

Sementara bertambahnya sambungan setelah dapat aliran air dari Sungai Telaga Waja, diingatkan masyarakat. "Jangan lupa, jika pipa itu meledak, menyebabkan banjir di pemukiman. Seperti yang sering terjadi di Banjar/Desa Duda, Kecamatan Selat dan Banjar Bambang Bi-aung, Desa Duda," ujar tokoh dari Desa Duda, I Gusti Agung Ngurah Putra. **k16**